

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azhary, 1990, *Negara Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Belinfante, Mr. A.D. dalam H. Boerhanoeddin Soetan Batoeah, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Binacipta, Anggota IKAPI.
- Effendy Lotulung, Paulus, 1993, *Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi (Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, Zairin, 2008, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. dkk, 2015, *Cetakan Keduabelas, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 2003, Buku II, *Cetakan Kedelapan, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Indra Permana, Tri Cahya, 2016, *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*, Genta Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Marbun, S.F., 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marbun, S.F. – Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Cetakan Ke 7, Penelitian Hukum*, PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Cetakan Keempat, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prins, W.F. - R. Kosim Adisapoetra, 1987, *Cetakan Keenam, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Purbopranoto, Kuntjoro, 1981, *Perkembangan hukum Administrasi Indonesia*, Angkasa Offset Bandung.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Soehino, 1984, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, Maria S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bahan Kuliah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Seno Adji, Oemar, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Anggota IKAPI, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono – Sri Mamudji, 2015, *Cetakan Ketujuhbelas, Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta,

Soemitro, Rochmat, 1990, *Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Eresco-Anggota IKAPI, Bandung.

Sutantio, Retnowulan – Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Pudyatmoko, Y Sri, dan Tjandra, W. Riawan, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Tjandra, W. Riawan, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

_____, 2010, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Tjakranegara, R. Soegijatno, 2000, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Utrecht, E / Moh. Saleh Djindang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.

Utrecht, E, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Wiyono, R, 2008, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yaved Neno, Victor, 2006, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Citra Aditya Bakti, Anggota IKAPI.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah Perubahan, dalam satu naskah.

Republik Indonesia. 1986. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara RI Tahun 1986, Nomor 77.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 35.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 160.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 292.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Berita Negara RI Tahun 2015, Nomor 1268.

Republik Indonesia. 2016. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Karya ilmiah dan lainnya

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta.

Etis Cahyaning Putri, 2015, *Tesis, Tinjauan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Kewajiban Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 60/G/2010/PTUN.Sby dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 57/G/TUN/2001/PTUN.Smg)*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tri Cahya Indra Permana, *Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau dari Segi Acces to Justice*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2014: 419-442.

Zainal Arifin Mochtar, *Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Hasanuddin Law Review, Vol 1, Issue 3 Desember 2015.

Firzhal Arzhi Jiwantara & Gatot Dwi Hendro Wibowo, *kekuatan eksekutorial putusan ptun dan implikasi dalam pelaksanaannya*, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Volume II, Nomor 4, April 2014.

Enrico Simanjuntak, *Menggagas Rambu-Rambu Pemeriksaan Perkara Fiktif Positif (Some Idea And Guidelines For Tacit Authorisation Proceedings)*, Jurnal Hukum Mahkamah Agung (rencana terbit pada akhir Tahun 2017).

Hasil wawancara dengan Enrico Simanjuntak, Hakim Yustisial/Asisten DIT.
BINGANISDILTUN pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada
hari Rabu-Minggu , tanggal 10-15 Mei Tahun 2017.

Hasil Wawancara dengan Subur MS, Hakim pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta, pada Selasa, tanggal 9 Mei Tahun 2017.

Hasil wawancara dengan Kuasa Hukum Pemohon pada Putusan Nomor
04/P/FP/2016/PTUN-JKT, pada Tanggal 13 Juli 2017.

Media Internet

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 10 Januari 2017.

<http://kbbi.web.id> diakses pada 4 Januari 2017

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0123>
diakses pada 1 21 Agustus 2017.

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en diakses pada 5
September 2017.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0123>
pada 8 September 2017.